

DAFTAR BACAAN**BUKU**

- Alfiah, Ratna Nurul, *Praperadilan dan ruang lingkupnya*, CV Akademika Persindo, Jakarta, 1986
- Anto, Rusdi, “*Lemahnya Moral dan Penegakkan Hukum Bagi Koruptor Kerah Putih*”, Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat, Juli 2018
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang Setara Press, 2016
- Chazawi, Adam, *Pelajaran hukum pidana bagian I*, raja grafindo persada, 2002
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Hantington, Samuel P., *political orders in changing societies, new haven and london*, Yale University Press, 1968
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika, 2007
- Hartono, *penyidikan dan penegakan hukum pidana*, sinar grafika, Jakarta, 2010
- Hasbalah, Frieda Husni, *HUKUM KEBENDAAN PERDATA, Hak-hak yang memberi kenikmatan Jilid I*, Ind-Hil-Co, Jakarta; 2005
- Herimulyanto, Agustinus, *Sita Berbasis nilai pengembalian aset tindak pidana korupsi*, genta publishing, Yogyakarta, 2019
- Huda, Chairul, *dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*, kencana prenatal media, Jakarta, 2006
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Kumpulan kuliah bagian dua, Balai Lektur Mahasiswa, 1998.
- Khairandi, Ridwan, *hukum kontrak indonesia dalam perspektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII PRESS, 2016

- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Jakarta, 1978
- Muhammad Rusly, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h.248
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik, “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*”, Bandung: PT Alumni, 2011
- Patra, A. M. Zen, dan daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia edisi 2006*, sentralise production, 2006
- Poerwadinata, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, 2015, Surabaya
- Seni, Oemar, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1981
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, 2009

INTERNET

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “BPK Berkoordinasi dengan kejaksaan agung terkait pemeriksaan atas PT. Asuransi Jiwasraya”, www.bpk.go.id, 09 Januari 2020, diakses pada tanggal 23 Desember 2020.
- DA, Ady Thea, “Mendorong Penguatan Perlindungan Hukum Perlindungan Harta Pihak ketiga beritikad baik dalam perkara tipikor dan TPPU” www.hukumonline.com, 27 Oktober 2020, diakses pada tanggal 23 Desember 2020
- Harefa, Thomas E., Pakar TPPU : Kejaksaan harus hati-hati Lakukan Pembekuan SRE Wanaartha Life, www.investor.id, 29 Oktober 2020, diakses pada tanggal 23 Desember 2020
- Indonesia Corruption Watch, ICW : Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp32,9 T di 2020, www.cnnindonesia.com, 11 Oktober 2020, Dikunjungi pada 11 Desember 2020.

Indra, R., ‘Upaya Hukum dalam Perkara Pidana’, [www. doktorhukum.com](http://www.doktorhukum.com), 19 Juli 2019, diakses pada 23 Desember 2020.

Mahkamah Konstitusi, ‘MK:”Pihak Ketiga berkepentingan” berhak ajukan Praperadilan mencakup masyarakat luas’, www.mkri.id, 08 Januari 2013. Diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

Subani, Andri, Hakim Urai Kolaborasi Jahat Benny Tjokro di kasus Jiwasraya, www.republika.co.id, , 27 Oktober 2020, dikunjungi pada tanggal 23 Desember 2020

Wikipedia, Motion in Limine,www.wikipedia.org, 30 December 2020, diakses pada 24 Desember 2020.

Winarta, Frans H., “Korupsi di Sektor Swasta Luput dari Perhatian”, www.hukumonline.com, tanggal 22 Februari 2019.

JURNAL

Council of europe,*impact study on civil forfeiture*, Council of Europe Office in Belgrade, Belgrade,2013

Kurniawan, Muhammad Rezza dan Pujiono, “*MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH PNS*”, Jurnal Law Reform, Vol. 14 No. 1,Tahun 2018

OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia, *Confiscation of Instrumentalities and proceeds of corruption crimes in Eastern Europe and Central Asia*,OECD,2018

Ramelan dan Reda Mathovani dan Pauline David, *Panduan Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Jakarta, Pusat Pelatihan Kejaksaan RI,2008

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Article 31 paragraph (1), subpara a, United Nations Conventions Against Corruption, 2003 (UNCAC)

Directive 2014/42/EU OF THE EUROPEAN PARLEMENT AND COUNCIL OF 3 APRIL 2014 about on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union

Federal Rule Evidence of United States

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP)